



PEMKOT EVALUASI KINERJA PEMBERDAYAAN KELUARGA

Butuh Kolaborasi Tangani Masalah Rumah Tangga

YOGYA (KR) - Permasalahan sosial yang berkaitan dengan rumah tangga tetap menjadi perhatian pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya sebagai bagian dari Pemkot membutuhkan kolaborasi untuk menangani masalah tersebut.

Kepala DP3AP2KB Kota Yogya Retnaningtyas, untuk menggalang kolaborasi tersebut pihaknya telah menyelenggarakan forum konsultasi publik guna mengevaluasi kinerja selama setahun terakhir. Forum itu dihadiri oleh perwakilan masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

"Dibutuhkan transparansi dan keterlibatan masyarakat serta stakeholder terkait dalam peningkatan pelayanan publik, khususnya terkait isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana," urainya, Minggu (13/10).

Menurutnya, melalui forum konsultasi publik pihaknya mendapatkan masukan langsung dari masyarakat mengenai program-program yang telah dijalankan. "Kami berharap forum itu bisa menjadi sarana bagi masyarakat maupun komunitas untuk menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi, terkait dengan layanan yang kami berikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang

diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, beberapa isu yang menjadi sorotan dalam forum tersebut meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang di Kota Yogya. Ia berharap, akan ada kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak serta tindak pelecehan seksual.

Sementara itu, Sekretaris DP3-AP2KB Kota Yogya Sarmin, mengungkapkan, ada 14 layanan yang sudah diberikan. Di antaranya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), layanan Keluarga Berencana (KB), dan layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogya.

Pihaknya mengatakan, untuk layanan KB di Kota Yogya terlayani hingga 71,79 persen yakni

sebanyak 1.395 orang yang sudah terlayani KB baik IUD, pil KB, implan, maupun suntik KB. Kemudian layanan dari UPT PPA Kota Yogya khususnya dalam pelayanan penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak, telah menerima banyak laporan. Dari laporan itu sebanyak 87 persen korban adalah perempuan dan sampai saat ini pelayanan kasus kekerasan di Kota Yogya sudah sebanyak 223.248 kasus.

Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Upik Soffie mengungkapkan, layanan yang diberikan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Harapannya, bentuk tindak lanjut terhadap suatu permasalahan dapat terselesaikan secara optimal dengan berbagai macam bentuk nyata dalam penanganannya.

Ia berharap, antara Puspaga dan Puspaga Kota Yogya terus bersinergi dengan baik. Sehingga, harapannya masyarakat yang menjadi korban baik korban kekerasan, pelecehan seksual dan permasalahan perempuan dan anak lainnya, mendapatkan layanan yang semestinya dari pemerintah.

"Kita butuh langkah yang lebih nyata dalam melindungi anak-anak sesuai dengan hak-hak yang mereka harus dapatkan," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005